

**IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI SEBAGAI SOLUSI BAGI  
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL**

***IMPLEMENTATION OF THE VALUE OF DEMOCRACY AS A SOLUTION  
FOR POVERTY ALLEVIATION AND SOCIAL GAP***

**Dendi Sutarto**

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan

[dendi\\_sutarto@yahoo.co.id](mailto:dendi_sutarto@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi, dan menjadi ruh, nilai atau transformasi nilai Pancasila ke dalam sistem demokrasi menjadi hal yang wajib, kekuatan ideologi dan falsafah bangsa awal demokrasi bertransformasi menjadi demokrasi Pancasila sekaligus menjadi kekuatan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai, khususnya aspek politik dan pembangunan kesejahteraan, keadilan sosial. Nilai-nilai terkandung dalam pancasila meliputi; nilai religious, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu nilai-nilai demokrasi; nilai kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan kebebasan, supremasi sipil dan persamaan hak politik. Penelitian ini adalah kajian literature (*literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji secara kritis gagasan, pengetahuan, temuan yang ada dalam literature, temuan lapangan dan dokumen, dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan perspektif Pancasila. Hasil penelitian ini mengungkap pentingnya implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara konprehensif, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan sistem demokrasi yang berkeadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci** : Demokrasi, Pancasila, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial

**ABSTRACT**

*Implementing Pancasila values in a democratic life, and becoming a spirit, values or the transformation of Pancasila values into a democratic system is a must, so that the power of the nation's initial ideology and philosophy can transform into Pancasila democracy. . as a force capable of implementing Pancasila values in various aspects, especially in the fields of politics and welfare development, social justice. The values contained in Pancasila include; religious values, kinship, harmony, people, and justice. Apart from that democratic values; values of people's sovereignty, rule of law, guarantee of freedom, civil supremacy and equal political rights. This research is a literature study that critically examines ideas, knowledge, findings in literature, field findings and documents using descriptive qualitative*

*methods. This study uses the Pancasila perspective. The results of this study reveal the importance of implementing Pancasila democratic values in the life of the nation and state as a whole, so as to create a clean government and a democratic system that is just and realizes people's welfare.*

**Keywords :** *Democracy, Pancasila, Poverty, Social Welfare*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan demokrasi di Indonesia hari ini menjadi sorotan semua pihak, termasuk masyarakat dunia (asing). Demokrasi yang menjadi sistem politik diharapkan mampu menjadi tumpuhan masyarakat untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan. Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila, tentu tidak hanya berbicara bagaimana system pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun sejati bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi, atau bagaimana memberikan ruh, nilai atau transformasi nilai Pancasila ke dalam sistem demokrasi. Karena kita sadar bahwa demokrasi adalah produk Barat, sehingga dengan kekuatan ideologi dan falsafah bangsa akhirnya demokrasi bertransformasi menjadi demokrasi Pancasila sekaligus menjadi kekuatan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai, khususnya aspek politik dan pembangunan kesejahteraan (keadilan sosial).

Nilai-nilai terkandung dalam pancasila meliputi; nilai religious, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu; nilai kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan kebebasan, supremasi sipil dan persamaan hak politik. Menurut pemikiran penulis nilai-nilai ini seharusnya menjadi ruh, nilai, semangat, dan paradigma demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, dan sekaligus mampu mengimplementasinya dengan harapan terciptanya kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila; Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, Keseimbangan antara hak dan kewajiban, Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, Mewujudkan rasa keadilan sosial, Pengambilan keputusan dengan musyawarah, Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Berangkat dari nilai ideal demokrasi Pancasila di atas, menurut pemikiran penulis ini menjadi kekuatan nilai dan kerangka berpikir sekaligus solusiterhadap berbagai persoalan terkait demokrasi dan carut marut dunia politik Indonesia seperti; demokrasi kita hari ini adalah demokrasi yang liberalistik-kapitalistik dan pragmatis, politik berbiaya mahal, *money* politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, partai politik telah menjadi tempat transaksi kekuasaan dan tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan politik mencerdaskan bangsa serta muncul dimasti-dinasti politik. Akibatnya dari persoalan di atas kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat lokal (bupati, wali kota dan gubernur) tidak lagi sepenuhnya berpihak pada rakyat sehingga lahirkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, baik kemiskinan struktural yang diciptak oleh pemerintah secara sadar ataupun kemiskinan kultural ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan karena kekurangannya daya dan kemandirian (pendidikan, ekonomi, modal sosial, nilai social budaya). Sehingga ini yang menjadi inti problem yang sangat mendasar mengapa pentingnya implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih, demokrasi yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, transparansi dan melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Penelitian ini adalah kajian literature (*literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji secara kritis gagasan, pengetahuan, temuan yang ada dalam literature, temuan lapangan dan dokumen, dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan perspektif Pancasila. Metode pengumpulan data literature, temuan lapangan dan dokumen analisis kritis kepustakaan, dan obyek penelitiannya menggunakan informasi kepustakaan, buku, hasil riset, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen.

## **PEMBAHASAN**

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat dihampir

setiap bangsa dan Negara. Demikian kuatnya faham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi isme, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab.

Menurut Joseph A. Schumpeter, suatu sistem politik bisa dikatakan bersifat demokratis apabila para pengambil keputusan kolektifnya yang terkuat dipilih melalui suatu pemilihan umum yang dilakukan secara berkala yang di dalamnya terdapat hak bagi manusia dewasa untuk memilih. Sebuah demokrasi mencakup 2 hal, yaitu persaingan dan partisipasi. Menurut Robert A. Dahl demokrasi harus memiliki persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang bersifat mengikat, adanya partisipasi yang efektif rakyat, pembeberan kebenaran, kontrol terakhir masyarakat terhadap agenda serta pencakupan masyarakat terkait dengan hukum.

Makna demokrasi, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tidak pernah betul-betul terjadi, karena elit politik dan aktor demokrasi tidak secara serius mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan nilai Pancasila dalam politik dan proses demokrasi. Sebagian besar masyarakat melihat bahwa demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran, stagnasi/kemandegan bahkan tak sedikit yang menilai Indonesia telah berada dalam otoriterisme, ketimpangan sosial dan kemiskinan. Untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang nilai, berikut dapat dikemukakan sebuah pengertian nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subyek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

Robin M. Williams dalam E. Imam Masduki mengemukakan bahwa ada empat buah kualitas tentang nilai-nilai, yaitu :

- a. Nilai-nilai mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam dibandingkan dengan hanya sekadar sensasi, emosi, atau kebutuhan. Dalam hal ini nilai dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalaman-pengalaman seseorang.

- b. Nilai-nilai menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang memiliki suatu aspek emosi. Emosi disini mungkin diungkapkan sebenarnya atau merupakan potensi.
- c. Nilai-nilai bukan merupakan tujuan konkrit dari tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan, sebab nilai-nilai berfungsi sebagai kriteria dalam memiliki tujuan-tujuan. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai.
- d. Nilai-nilai merupakan unsur penting, dan tidak dapat disepelekan bagi orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan, nilai-nilai berhubungan dengan pilihan, dan pilihan merupakan prasyarat untuk mengambil suatu keputusan.

### **1. Masalah Demokrasi di Indonesia**

Dalam survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 21 Agustus 2020, beberapatemuan dari hasil survey sebagian besar responden melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran (44,7%), stagnasi/kemandegan (23,7%) bahkan tak sedikit yang menilai kita telah berada dalam otoriterisme (28,9% ). Hanya 2,7% responden yang menilai demokrasi kita mengalami kemajuan.

Secara keseluruhan ada 25 permasalahan yang menandai kemunduran demokrasi di Indonesia. 21 di antaranya di dapat memulai hasil survei antara lain: 1. politik uang dalam pemilu (100%), 2. macetnya kaderisasi partai politik (94,7%), 3. populisme dan politik identitas (86,8%), 4. hilangnya oposisi (92,1%), 5. korupsi politik (100%), 6. kabar bohong dan ujaran kebencian (97,4%), 7. rendahnya literasi politik (92,1%), 8. lemahnya masyarakat sipil (89,5%), 9. rendahnya kualitas pemilu (100%), 10. media masa yang partisan (89,5%), 11. rendahnya literasi media (92,1%), 12. rendahnya efektivitas pemerintahan (94,7%), 13. rendahnya partisipasi politik (100%), 14. ancaman kebebasan berpendapat (94,7%), 15. ancaman kebebasan berserikat (94,7%), 16. imunitas terhadap pelanggar HAM (86,8%), 17. kesenjangan ekonomi (94,7%), 18. diskriminasi terhadap minoritas (97,4%), 19. toleransi atau anjuran terhadap kekerasan (94,6%), 20. terror siber terhadap kelompok kritis (92,1%), 21. kriminalisasi kelompok kritis (92,1%).

Dari data hasil survey LP3ES di atas menunjukkan secara komprehensif permasalahan demokrasi dan implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila di Indonesia masih menjadi persoalan yang mendasar di negeri kita, mulai dari praktek politik uang dalam pemilu (100%) sampai pada kesenjangan sosial (94,7%). Hal ini menunjukkan korelasi kebobrokan sistem demokras, kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Menurut *The Economist Intelligence Unit* merilis data terkini mengenai indeks demokrasi tahun 2019 di beberapa negara. Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. Tentu indeks demokrasi Indonesia hari ini belum bisa kita katakana baik, karena pada implementasi sistem demokrasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat, dimana angkat kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran masih tinggi. Kualitas demokrasi tentu memiliki relasi yang kuat dengan angka kemiskinan, karena jika kualitas demokrasi buruk maka akan melahirkan kualitas pemimpin yang buruk juga, kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dan integritas pemimpin lemah yang pada akhirnya melahirkan korupsi, kelompok rentan, kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 1,63 juta orang dibanding September 2019. Jika dibandingkan Maret 2019, meningkat 1,28 juta orang. Sementara itu Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 juta orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,- /rumah tangga miskin/bulan."Untuk Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652 per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 335.793 (73,86%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859 (26,14%),"

Dari data kemiskinan di atas menjadi pekerjaan rumah pemerintah, sekaligus menjadi tantangan proses transformasi nilai demokrasi ke arah yang jauh lebih baik sebagai jawaban atau solusi dari semua problem yang menyakut hajat hidup orang banyak. terutama menyakut kesejahteraan dan keadilan sosial, kerakyatan, kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan kebebasan, supremasi

sipil dan persamaan hak politik, sehingga proses demokrasi yang sehat melibatkan semua elemen bangsa dalam konteks politik yang berkeadilan sosial, kedaulatan rakyat dan kesejahteraan. Oleh sebab ini perlu formulasi dan strategi implementasi dan transformasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam konteks demokrasi di Indonesia untuk mengatasi problem kemiskinan dan kesenjangan sosial.

## **2. Implementasi Nilai Demokrasi dan Solusi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial**

Nilai-nilai terkandung dalam pancasila meliputi; nilai religious, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu; nilai kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan kebebasan, supremasi sipil dan persamaan hak politik. Hendaknya nilai ini menjadi spirit dan ruh dalam praktik demokrasi dan politik yang berkemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. Dari sepuluh nilai ini seharusnya berkesinambungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam aspek demokrasi dan politik:

1. Nilai religious harus menjadi pondasi nilai dalam seluruh aspek kehidupan bangsa termasuk kejujuran, moral, demokrasi, politik, birokrasi, empati, kemanusiaan, tolong menolong, integritas dan sebagainya, menjadi bagian dari perilaku sehari-hari para pejabat dan politisi kita.
2. Nilai keselarasan nilai yang menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk memahami dan sekaligus menerima segala bentuk perbedaan yang bersumber dari keragaman budaya di seluruh wilayah Nusantara, sehingga dalam berdemokrasi kita siap berbeda pilihan politik, partai, dan kepentingan, namun itu semua kalah dengan tujuan untuk bangsa, Negara dan kesejahteraan social.
3. Nilai kekeluargaan mengandung semangat kebersamaan yang tinggi dalam prinsip senasib sepenanggungan dalam hubungan sesama bangsa, yang membawa tanggungjawab saling melengkapi dan saling menguatkan, dan nilai itu juga yang menjadi spirit dan ruh demokrasi Pancasila, membangun bangsa Negara, sehingga para politisi tidak serakah dan tamak yang pada akhirnya korupsi.

4. Nilai kerakyatan mengandung semangat yang akan tercermin dalam sikap hidup menomorsatukan kepentingan rakyat, dalam arti meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan rakyat, di atas segala kepentingan pribadi atau golongan mana pun. Merupakan dasar bagi pengakuan terhadap rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan negara, yang dengan demikian memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan kehidupan bangsa dan negara, serta menentukan cara yang tepat untuk mencapainya. Nilai ini menjadi nilai dasar demokrasi Pancasila, sehingga kepentingan bangsa menjadi prioritas utama, kesejahteraan, keadilan sosial serta negara harus menjamin kesejahteraan dan melindungi orang miskin dan anak terlantar.
5. Nilai keadilan pada hakikatnya merupakan faktor penentu bagi tumbuh berkembangnya sikap saling percaya diantara elemen masyarakat, demi terwujudnya bangsa Indonesia yang tetap tegak bersatu, serta maju bersama menjadi bangsa besar, yang mampu meraih kesejahteraan bersama secara merata dan berimbang di seluruh wilayah tanahair. Dengan keadilan yang merata, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri, tidak mudah diatur atau dikendalikan oleh bangsa atau kekuatan asing.
6. Nilai kedaulatan rakyat, pengambilan keputusan kebijakan publik harus memperhatikan aspirasi dan partisipasi public, sehingga apa yang menjadi problem sosial bisa terslesaikan dengan baik.
7. Nilai supremasi hukum, penegakan hukum secara adil, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan di depan hukum tanpa terbelah pilih
8. Nilai jaminan kebebasan, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pikiran dan pendapat baik melalui tulisan maupun demonstrasi
9. Nilai supremasi sipil, pengakuan bahwa sistem politik kenegaraan berdasarkan atas prinsip supremasi sipil, dan hak-hak masyarakat dilindungi dan diakomodir sehingga masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan
10. Persamaan hak politik, setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban dan kesempatan yang sama dalam politik dan ikut serta pemerintahan.

Dengan penerapan dan transformasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam demokrasi hendaknya tidak ada lagi pemikiran dan niatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pragmatism politik yang berorientasi jangka pendek untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga perlu transformasi dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dari hal terkecil sekalipun, dari lingkungan keluarga, rumah tangga, masyarakat, dan sekolah secara komprehensif dan perubahan paradigma sehingga mampu merubah perilaku birokratik, public, dan dunia politik menjadi lebih baik; kognitif, afektif dan psikomotorik.

Berdasarkan 25 masalah demokrasi yang kita hadapi saat ini yang disampaikan hasil survey LP3ES, perlu pemantapan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, konstitusi dan perubahan paradigm para elit politik, pejabat publik, politisi, partai politik, dan masyarakat sehingga ada perbaikan baik dari sistem, kualitas demokrasi, kebijakan, dan peningkatan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sosial. Dalam kehidupan politik dan demokratisasi berarti gagal demokrasi menurut Haryatmoko, tetapi mekanisme dan proses demokrasi harus selalu di kontrol dan dikoreksi agar aspirasi masyarakat mendapat tempat. Oleh karenanya implementasi dari nilai-nilai demokrasi di atas untuk menhidupkan kembali kontrol dan dikoreksi agar aspirasi masyarakat mendapat tempat dan hak-hak mereka.

Dengan proses demokrasi yang mampu mendekatkan nilai-nilai Pancasila ke kehidupan masyarakat khususnya dalam politik demokratis, sehingga potensi korupsi, *money* politik, keserakahan, ketidakadilan sosial akan teratasi dengan baik, sehingga muncul kebijakan-kebijakan dan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga amanah kekuasaan politik bukan untuk memperkaya diri dan kelompok, namun untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

1. Dalam demokrasi saat ini terjadi pergeseran paradigma dan nilai, yang seharusnya sistem demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, justru hari ini demokrasi kita menjadi demokrasi liberalistik-kapitalistik yang bercorak progratisme, sehingga tatanan nilai-nilai religious, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan kebebasan, supremasi sipil, persamaan hak politik dan keadilan tidak lagi menjadi ruh, spirit dalam demokrasi sehingga berbagai macam problem politik, kebijakan muncul salah satunya kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan banyak lagi masalahnya. Masalah politik uang dalam pemilu, macetnya kaderisasi partai politik, populisme dan politik identitas, hilangnya oposisi, korupsi politik, kabar bohong dan ujaran kebencian, rendahnya literasi politik, lemahnya masyarakat sipil, rendahnya kualitas pemilu, media masa yang partisan, rendahnya literasi dan media, rendahnya efektivitas pemerintahan, rendahnya partisipasi politik, ancaman kebebasan berpendapat, ancaman kebebasan berserikat, imunitas terhadap pelanggar HAM, kesenjangan ekonomi, diskriminasi terhadap minoritas, toleransi atau anjuran terhadap kekerasan, terror siber terhadap kelompok kritis, dan kriminalisasi kelompok kritis.
2. Masalah yang ada dalam demokrasi akhirnya melahirkan kemiskinan dan kesenjangan sosial dan ketidakadilan sosial. Sebagai solusinya harus mengimplementasikan dan mentransformasi nilai-nilai demokrasi yang hakiki berdasarkan nilai Pancasila dan konstitusi, dengan mengawinkan integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam transformasi kehidupan nyata yang berkeadilan social, yang mampu menciptakan kualitas demokrasi dan kebijakan yang mampu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **SARAN**

1. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam sistem demokrasi dan politik harus mengimplementasikan dan mentransformasikan dalam berbagai elemen masyarakat dan lembaga; pendidikan, partai politik, birokrasi, pemerintahan, kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial, sehingga mencerahkan

dan merubah paradigama publik, masyarakat dalam menciptaka politik bersih dan pembangunan kesejahteraan. Harus ada perubahan paradigm pemimpin dan pengambil kebijakan dalam menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan, dan harus ditopang oleh pemimpin yang punya integritas moral dan SDM yang mempuni yang memiliki pola pikir visioner dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

2. Harus muncul figur-figur baru yang berintegritas moral tinggi, berpengetahuan, visioner untuk membangun kebijakan yang mampu mensejahterakan dalam kontek global.

## REFERENSI

Abd. Kadir Patta, *Masalah dan Prospek Demokrasi*, Jurnal Academica Fisip Untad Vol. I 2009

Cholisin, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Diktat. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2012

E. Imam Maksudi, *Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Pancasila*, Materi Pelatihan untuk Pelatih (ToT) Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Taplai Angkatan VI Lemhannas RI, 2020

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011

Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Haryatmoko, *Etika dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2014

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2003

Kartiko, Kusno Haryo, *Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia 1945*, 2020; Materi Pelatihan untuk Pelatih (ToT) Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Taplai Angkatan VI Lemhannas RI, 2020

Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1997

Miriam Budiarjjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Noor MS Bakry, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001

Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2020

Kompas.com 23 Januari 2020

LP3ES, *Survei tentang Demokrasi di Indonesia*, 21 Agustus 2020